

## Evaluasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

\* Selvia Lestari<sup>1</sup>, Septa Juliana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : selvialestari@student.uir.ac.id

### Abstrak

Evaluasi program Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu proses penting guna mengukur efektifitas serta dampak program-program yang berlangsungm PKK. Harapan dari tuas. ini yaitu memahami evaluasi program Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) dalam pemberdayaan masyarakat desa Koto Baru kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi.dibawah ini adapun struktur organisasi pemerintahan desa koto baru.terkait Teori evaluasi yang dikembangkan oleh William N. Dunn menjadi landasan dalam riset ini. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu riset deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi serta menganalisis suatu fenomena guna memberikan pemahaman lebih mendalam dalam penyelesaian masalah. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Koto Baru, serta belum diterapkannya tindakan tegas atau sanksi terhadap warga yang enggan berpartisipasi dalam program tersebut xq yang ada di desa koto baru pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan sangat baik, namun masih belum mencapai tujuan yang di inginkan, yang mana masih banyak masyarakat yang masih tidak mau terlibat kedalam program PKK.

**Kata kunci:** Evaluasi, Pemberdayaan, Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)

### Abstract

*The Evaluation of the Family Welfare Program (PKK) is an important process to measure the effectiveness and impact of ongoing PKK programs. The hope of this lever is to understand the evaluation of the Family Empowerment and Welfare (PKK) program in empowering the Koto Baru village community, Singingi Hilir sub-district, Kuantan Singingi district. Below is the organizational structure of the Koto Baru village government. Related to the evaluation theory developed by William N. Dunn as the basis for this research. The method used in writing this thesis is qualitative descriptive research, which aims to explore and analyze a phenomenon in order to provide a deeper understanding in solving problems. The main problem raised in this study is the lack of community participation in the Family Empowerment and Welfare (PKK) program in Koto Baru Village, and the lack of strict action or sanctions against residents who are reluctant to participate in the program xq in Koto Baru village has basically been implemented very well, but still has not achieved the desired goal, where there are still many people who still do not want to be involved in the PKK program.*

**Keywords:** : Evaluation, Empowerment, Family Welfare Program (PKK)

## PENDAHULUAN

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mendukung kemajuan suatu daerah. Organisasi ini tumbuh dari inisiatif masyarakat dengan perempuan sebagai penggerak utama dalam membimbing, membangun, serta mewujudkan keluarga yang sejahtera sebagai unit fundamental dalam struktur sosial (Kemendagri, 2013:1).

Dalam rangka meningkatkan serta memperluas pemberdayaan perempuan di Desa Koto Baru, pada tahun 1999 dibentuk sebuah inisiatif yang dikenal sebagai Gerakan PKK. Gerakan ini dirancang agar dapat berkembang secara berkelanjutan serta memiliki ketahanan dalam menghadapi dinamika perubahan, baik di tingkat nasional maupun global. Selain itu, PKK juga berorientasi pada optimalisasi layanan guna mendukung kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan program PKK, pada 19 Mei 2020, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 yang merupakan ketentuan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengarahkan kebijakan dan operasional PKK di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada 8, 9, dan 16 Maret 2021, diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX PKK yang dipimpin oleh Ketua Umum TP PKK, Ibu Tri Tito Karnavian. Dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat itu, Rakernas dilaksanakan secara daring. Dalam forum tersebut, terdapat empat agenda utama yang dibahas dan disepakati bersama.

PKK berfokus pada peningkatan tugas wanita saat pembangunan desa dengan berbagai program yang telah dirancang. Dengan demikian, perempuan diposisikan sebagai agen perubahan yang berkontribusi besar terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas. PKK sendiri memiliki sepuluh program utama, yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila, kebersamaan, kemandirian pangan, kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, koperasi, lingkungan, dan perencanaan keluarga.

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi yang setara dengan laki-laki dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan. Secara hukum, perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di semua sektor kehidupan. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, menjamin kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara tanpa memandang gender. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah semakin aktif dalam mendorong pembangunan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mempercepat pembangunan desa, salah satunya melalui penguatan organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat.

Dalam konteks ini, perempuan juga memiliki peran penting dalam organisasi tertentu yang memungkinkan mereka berkontribusi dalam pembangunan desa. Mereka dapat berpartisipasi aktif dalam menggerakkan keterlibatan masyarakat desa. Salah satu organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan di tingkat desa dan kelurahan adalah PKK. Melalui organisasi ini, perempuan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dahulu, perempuan lebih sering dikaitkan dengan tanggung jawab dalam keluarga dan urusan domestik, sementara laki-laki dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab di ranah publik, seperti ekonomi, politik, serta institusi-institusi yang mendukung kehidupan sosial modern (Sugiarti dalam Dhevyanti, 2015:3). Namun, seiring perkembangan zaman, perempuan semakin diberi ruang untuk terlibat dalam berbagai bidang di luar rumah tangga, termasuk dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat.

PKK merupakan organisasi masyarakat di tingkat desa yang berperan dalam mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan serta berkontribusi terhadap pertumbuhan desa. Sebagai gerakan yang berkembang dari masyarakat akar rumput, PKK menempatkan perempuan sebagai motor penggerak dalam membangun, membimbing, dan membentuk keluarga demi terciptanya kesejahteraan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Struktur organisasi PKK telah terlembaga dengan baik di berbagai tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Fokus utama PKK adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengingat keluarga memiliki peran fundamental dalam menentukan keberhasilan pembangunan serta mendukung berbagai program pemerintah. Kesejahteraan keluarga yang tercipta akan berdampak positif pada kehidupan berbangsa dan bernegara, menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan damai.

Karenanya, kesejahteraan keluarga menjadi indikator penting dalam proses pembangunan, selaras dengan program-program pemerintah yang berbasis pada pengumpulan data penting, seperti jumlah penduduk, ibu hamil, bayi dan balita, angka kelahiran serta kematian, hingga berbagai aktivitas sosial masyarakat.

**Tabel.1**  
**Daftar Anggota PKK Desa Koto Baru Tahun 2021-2024**

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2020	21 Orang
2	2021	21 Orang
3	2022	21 Orang
4	2023	21 Orang
5	2024	21 Orang

Sumber : PKK Desa Koto Baru

Masa kepemimpinan Ketua Umum TP PKK serta Ketua TP PKK di berbagai tingkatan administratif, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan, berlangsung sejak momen pelantikan hingga akhir masa jabatan pejabat pemerintahan yang bersangkutan, seperti Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, atau Lurah/Kepala Desa. Sementara itu, pengurus TP PKK di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan memiliki masa bakti selama lima tahun terhitung sejak pelantikan. Khusus untuk pengurus TP PKK di tingkat desa, masa jabatannya ditetapkan selama enam tahun sejak resmi dilantik.

**Tabel.2.**  
**Data Program PKK Desa Koto Baru Perode 2024**

No	Nama Program	Jumlah Terdaftar	Jumlah Yang Aktif
1	Posyandu Balita	265 Anak	170 Anak

No	Nama Program	Jumlah Terdaftar	Jumlah Yang Aktif
2	Posyandu Bumil	22 Orang	20 Orang
3	Wirid Yasin Besar	1.666 KK	100 Orang
4	Wirid Yasin RT	7 RT	4 RT

Sumber : PKK Desa Koto Baru, 2024

Pendanaan yang digunakan PKK dalam menjalankan berbagai kegiatannya telah diatur dalam Permendagri No. 36 Tahun 2020, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perpres No. 99 Tahun 2017 tentang PKK.

Sumber dana yang menunjang program PKK mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta sumber lain yang sah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara umum, kegiatan PKK berfokus pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa melalui berbagai program yang telah dirancang.

Hal ini menempatkan perempuan sebagai aktor kunci dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam PKK berperan penting dalam mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga eksistensi mereka diakui secara luas. Hasil dari pemberdayaan ini dapat terlihat melalui peningkatan kualitas hidup keluarga serta pertumbuhan ekonomi dalam lingkup keluarga itu sendiri. Untuk memperkuat peran perempuan dalam PKK, diperlukan percepatan penguatan organisasi melalui Reformasi PKK. Inisiatif ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi PKK dalam mendukung kesejahteraan keluarga di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun fenomena yang dijumpai di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Terindeksi bahwa tidak semua balita dan bumil yang ada di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ikut melaksanakan program posyandu yang diadakan oleh PKK
2. Teridentifikasi masih banyak yang tidak mengikuti program wirid yasin di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi baik wirid yasin yang besar maupun wirid yasin antar RT

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif, yaitu pendekatan ilmiah yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan baik dalam ranah praktis maupun teoritis. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang ada secara mendalam melalui eksplorasi terhadap pandangan, pengalaman/makna yang diberikan oleh individu / kelompok pada suatu situasi.

Riset ini akan berlangsung di Kantor Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada urgensi untuk menganalisis sejauh mana keberadaan organisasi PKK berkontribusi terhadap penguatan masyarakat di desa tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah program kerja serta peran PKK dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Guna memperoleh data yang akurat, peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan. Melalui interaksi tatap muka ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam terkait pengalaman, pandangan, serta persepsi subjek terhadap fenomena yang diteliti. Peneliti mengamati secara langsung perilaku, interaksi, atau

situasi yang terjadi dilapangan. Kemudian mengumpulkan data dilakukan dengan dokumen - dokumen yang berupa gambar atau lainnya Sebagai bukti penelitian lapangan, wawancara langsung dilakukan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi informan secara mendalam.

Pemilihan informan pada riset ini berfokus pada individu yang memiliki wawasan mendalam dan relevan terhadap topik penelitian, sehingga data faktual yang dihimpun dapat dipercaya dan akurat. Informan yang dipilih meliputi:

1. Kepala Desa
2. Ketua PPK
3. Sekretaris PPK
4. Anggota PPK

Dari pengamatan awal penulis berinteraksi langsung dan melakukan wawancara dengan Kepala Desa Koto Baru dan Ketua Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa Koto Baru. Penulis melaksanakan observasi sebagai langkah awal mengetahui keadaan nyata yang terjadi dilapangan berguna mendapat informasi yang jelas serta akurat. Selain melakukan observasi, penulis juga mewawancarai pihak terkait guna menggali data secara mendalam serta mendapatkan informasi lengkap mengenai evaluasi peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

#### a. Efektivitas

Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan guna mewujudkan tujuan yang ditentukan dengan proses yang efektif dan tepat. Istilah ini juga mencerminkan kemampuan memilih metode terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Efektivitas dapat diukur dari sejauh mana suatu tujuan berhasil diwujudkan. Misalnya, jika suatu tugas dapat diselesaikan dengan metode yang telah ditentukan dan terbukti berhasil, maka metode tersebut dianggap efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa dari indikator efektivitas saat ini masih proses untuk menetapkan program kerja PKK dengan mengupayakan penetapan aturan tentang kegiatan-kegiatan PKK. Jadi setiap masyarakat yang terlibat kedalam anggota PKK harus mencoba untuk meningkatkan dan terlaksananya program Kerja yang di adakan oleh PKK Desa Koto Baru dengan semaksimal mungkin. Program-program kerja yang dimiliki oleh PKK pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan baik, namun program kerja tersebut belum mencapai hasil yang maksimal yang diinginkan, tentunya ini butuh proses, karena masih ada warga Desa Koto Baru yang belum menyadari pentingnya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PKK. Masyarakat tetap akan menganggap sepele dari kegiatan PKK, dikarenakan tidak ada sanksi bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh PKK desa Koto Baru.

#### b. Efisiensi

Efisiensi merujuk pada pemanfaatan sumber daya secara minimal guna memperoleh hasil yang maksimal. Konsep ini menitikberatkan pada pencarian cara paling efektif dalam merealisasikan tujuan yang telah ditentukan. Tingkat efisiensi dapat dianalisis secara komparatif dengan menilai perbandingan terhadap sumber daya yang dijalankan dengan hasil akhir yang didapat. Selain itu, efisiensi juga menjadi tolok ukur keberhasilan

suatu kegiatan berdasarkan jumlah biaya atau sumber daya yang dikeluarkan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Semakin sedikit usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu, semakin tinggi tingkat efisiensinya.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa dalam pengawasan dari PKK itu sendiri tetap dilakukan oleh pemerintah Desa Koto Baru. Jadi sumber daya dalam melaksanakan kegiatan PKK tetap melibatkan masyarakat Desa Koto Baru. Terkait akan pendataan masyarakat yang akan mengikuti kegiatan PKK tetap didata oleh para pengurus PKK dan masih dalam pengawasan pemerintah Desa.

### c. Kecukupan

Kecukupan mengacu pada sejauh mana suatu tujuan telah tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh berbagai lapisan masyarakat. Konsep ini berkaitan erat dengan efektivitas, yakni sejauh mana suatu tindakan atau kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang muncul dari suatu permasalahan. Kecukupan juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai atau memperkirakan apakah alternatif yang tersedia dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada serta menjalankan tugasnya secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa pendataan itu memang ada. Namun pendataan untuk masyarakat dalam mengikuti kegiatan PKK seperti posyandu dan wirit yasin tidak dilakukan secara merata dan keseluruhan sehingga mengakibatkan akan banyaknya masyarakat yang menganggap kegiatan PKK di Desa Koto Baru tidak penting. Alternative pemecahan masalah jika masyarakat Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan harus adanya sosialisasi oleh pengurus PKK yang memang belum dilakukan oleh pemerintah PKK desa Koto Baru.

### d. Pemerataan

Pemerataan berkaitan dengan prinsip keadilan dalam distribusi manfaat dan usaha di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Konsep ini berhubungan erat dengan rasionalitas hukum dan sosial, yang menekankan kesetaraan dalam pembagian hasil dan dampak suatu kebijakan atau tindakan. Dalam pelaksanaannya, pemerataan mencerminkan sejauh mana keadilan dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang menjadi sasaran suatu kebijakan atau program publik. Pemerataan adalah cara pemeratakan dengan persamaan yang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa desa diberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan PKK yang ada di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi melalui kepengurusan PKK yang ada di Desa Koto Baru dan melalui lembaga kemasyarakatan RT dan RW dan juga bisa dilakukan melalui media sosial. Serta sanksi yang diberikan kepada masyarakat jika tidak ikut serta dalam kegiatan PKK desa koto baru dapat berupa tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah desa dan pelayanan yang berkaitan dengan PKK bagi masyarakat yang tidak mau ikut serta.

### e. Responsivitas

Daya tanggap merujuk pada kapasitas birokrasi dalam memahami kebutuhan publik, merancang agenda serta menetapkan prioritas layanan, dan menyusun program yang selaras dengan aspirasi masyarakat. Daya tanggap juga mencerminkan komitmen untuk memberikan bantuan kepada masyarakat serta menyelenggarakan pelayanan secara cepat dan efisien. Konsep ini berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dalam

merespons serta mengantisipasi berbagai aspirasi, dinamika, tuntutan, serta perkembangan pengetahuan yang terus berubah.

Menurut Hormon, daya tanggap menggambarkan kapabilitas pemerintah atau lembaga dalam mengenali kebutuhan, merancang agenda dan skala prioritas, hingga pengembangan kebijakan dan program yang sesuai harapan masyarakat. Sementara itu, Dwiyanto (2006:148) menjelaskan bahwa daya tanggap adalah kemampuan suatu organisasi dalam mengidentifikasi keperluan masyarakat, merencanakan prioritas layanan, serta menerjemahkannya ke dalam sejumlah kegiatan yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa dari indikator responsif saat melaksanakan program kerja PKK ini dilakukan melalui kader-kader PKK yang menginduksikan kepada kelembagaan masyarakat desa koto baru. Pembinaan anggota PKK dilakukan kepada kader-kader PKK namun belum dilakukan secara menyeluruh. Pembinaan bagi kader-kader PKK belum ada dengan sosialisasi yang bahwasanya kegiatan PKK untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa koto baru. Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK desa koto baru diharapkan akan memberikan manfaat untuk memperdayakan masyarakat Desa koto baru. Masyarakat desa koto baru kalau masalah pembinaan tanggung jawab atas kegiatan PKK bagi masyarakat berada pada masyarakat desa koto baru itu sendiri. Penanganan pelanggaran mengenai masyarakat yang tidak mau ikut serta pada aktivitas yang diselenggarakan oleh PKK merupakan tanggung jawab dari pengurus PKK desa koto baru kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi. PKK itu sendiri merupakan badan yang berwenang kalau dalam penanganan pelanggaran bagi masyarakat yang tidak mau terlibat dalam kegiatan PKK, desa hanya memiliki kewenangan dalam menegur masyarakat yang tidak ikut serta dalam kegiatan PKK desa koto baru.

#### **f. Ketepatan**

Ketepatan merujuk pada kemampuan individu dalam mengarahkan suatu gerakan menuju target yang sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan. (Suharno, 1993:32). Sementara itu, menurut Muh Sajoto (1995:9), ketepatan merupakan kemampuan individu guna mengontrol gerakan bebas agar mencapai sasaran yang dituju. Faktor ini menjadi aspek penting bagi seseorang dalam mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa hasil dari pelaksanaan program kerja PKK desa koto baru kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi, akan memperoleh manfaat bagi masyarakat desa yang mencapai 70 persen dengan sebagian besar masyarakat koto baru telah terlibat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK. Dan sebagian kecilnya lagi ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan minim informasi dan kurangnya sosialisasi tentang kegiatan tersebut. Di desa kotobaru memiliki 2 bangunan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan posyandu baik untuk balita, ibuhami maupun untuk lansia. Sedangkan kegiatan wirit yasin akan diadakan bergilir di rumah setiap anggota yang mengikutinya.

#### **Faktor penghambat evaluasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga terhadap pemberdayaan masyarakat di desa koto baru kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi**

Berlandaskan temuan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa kendala dalam evaluasi program PKK terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain :

- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengikutinya kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK desa koto baru dipicu karena kurangnya sosialisasi.
- Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan PKK di desa koto baru.
- Masih sangat banyak terdapat masyarakat yang apatis dalam mengikutikegiatan program kerja PKK sehingga masih banyak masyarakat yang enggan dalam mengikuti kegiatan tersebut.
- Tidak dijelaskan secara jelas tentang adanya program kerja yang akan diselenggarakan oleh PKK yang diperuntukkn dalam pemberdayaan masyarakat Desa koto baru.
- Upaya yang dilakukan seperti memberikan informasi yang terkait sanksi yang diterima bagi masyarakat yang tidak mau terlibat dalam kegiatan program kerja PKK tidak pernah diterapkan di desa koto baru.
- Sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh kepada masyarakat desa koto baru kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi.

## SIMPULAN

Berlandaskan temuan analisa pada riset yang sudah berlangsung, demikian yang bisa ditarik kesimpulan meliputi:

PKK Desa Koto Baru telah menjalankan kegiatan dengan baik, namun belum mencapai hasil maksimal karena kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif, sehingga informasi tidak merata dan manfaat kegiatan tidak dipahami sepenuhnya. Terkait tindakan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau mengikuti kegiatan program kerja PKK desa koto baru kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi sepenuhnya adalah tanggung jawab dari pengurus dan anggota PKK, sedangkan desa hanya memiliki kewenangan dalam mengawasi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK desa koto baru. Namun, pengurus dan anggota PKK tidak mengambil langkah tegas apabila masyarakat tidak ikut serta dalam menyukseskan program yang diinisiasi oleh PKK di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tim Penggerak PKK Pusat. (2010). Hasil Rapat Kerja Tahunan Nasional VII PKK Tahun 2010. Jakarta: Tim Penggerak PKK Pusat.
- Suharto, Edi, 2010, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.
- Dhevyanti, 2015. Peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Meningkatkan Keterampilan Anggota Kota Semarang. Fakultas Ilmu Sosial Studi Pendidikan Kewarganegaraan UNNES
- Jannah, Miftahul. 2022. peran pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan keterampilan masyarakat di desa pohgading kecamatan pringgabaya kabupaten lombok timur. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri. Semarang. Volume VIII No 2 Oktober 2022
- Permendagri No 1 Tahun 2013 Pasal 1 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK